



nolak orang asing pada umumnya terikat oleh adanya ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh negara yang bersangkutan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa orang asing yang masuk kedalam wilayah suatu negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat oleh negara yang akan menerima orang asing tersebut. Dengan kata lain bahwa orang asing tidak boleh bebas begitu saja masuk dalam wilayah suatu negara.

Apabila mereka sudah diterima masuk dalam suatu negara, mereka harus diperlakukan sama seperti warga negaranya sendiri, tetapi ada pembatasan hak-hak tertentu. Negara yang bersangkutan hanya memberikan perlindungan, terhadap jiwa dan hartanya, selama mereka tunduk kepada hukum negara setempat.

Begitu juga dalam hal-hal yang terkait dengan masalah penolakan orang asing masuk ke wilayah suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan keamanan negara setempat, maka negara setempat berhak mengusirnya dengan berdasarkan kebijaksanaan yang ada dan tidak boleh sewenang-wenang yang dapat merugikan orang asing tersebut.















rikan terhadap mereka yang mencari suaka, tanpa membedakan suku bangsa, agama maupun kedudukannya dan juga mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan negara setempat dengan tidak menimbulkan kerusuhan atau kekacauan dalam negara tersebut.

Akan tetapi bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana di negaranya (negara non Islam) kemudian pergi mencari suaka di negara Islam, maka mereka tidak dikenakan hukuman menurut Islam. Tapi mendapatkan suaka karena negara tempat perbuatan tersebut dilakukan tidak menerapkan hukum Islam.

Pada bab sebelumnya juga telah disebutkan tentang teori berlakunya Syari'at Islam. Yang mana pada dasarnya syari'at Islam itu bersifat Internasional Universal, tapi dalam prakteknya bersifat regional yang hanya khusus dalam wilayah negara Islam.

Sejalan dengan ini, maka hukum Islam berlaku atas tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah suatu negara yang menerapkan hukum Islam, baik pelakunya orang Islam maupun non Islam. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah, apabila tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah negara Islam kemudian mereka masuk atau kembali ke dalam wilayah negara Islam, maka tidak dijatuhi hukum Islam karena negara Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat ter-





